

**EVALUASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH JEPARA NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN INDUSTRI
MEBEL DI KABUPATEN JEPARA**

Nahdya Yuris Adila dan Teguh Yuwono

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

ABSTRACT

Furniture industry in Jepara is the backbone of the economy, so it needs a policy to improve its existence and productivity. This research aims to determine the evaluation of the regional Policy assessment Jepara Number 2 year 2014 about the protection, empowerment and development of furniture industry and the factors that inhibit the development of furniture industry which is influential in the implementation of the policy.

The research methodology used is mixed method with data collection techniques such as interviews, data/archives, and questionnaires. Then analyzed using triangulation theory, source and method. The results showed that the policy was not optimal. This policy has been transformed effectively through the service of coaching, empowerment and protection but not efficient because of the lack of budgets and the implementation of socialization and the absence of SOP.

Its policy results have been able to improve the furniture industry that is competitive and independent so that it can improve the export of furniture industry. In addition there are facilitation of training activities, exhibitions, people's Business credit (KUR), road infrastructure, bridges, raw materials and furniture centers in Jepara, thus giving a good impact in the form of increased effort for the culprit. There are objectives that have not been achieved due to the factors that inhibit the scarcity of raw materials, limitations of quality and quantity of labor, disrupted market share conditions, online marketing abuse and the existence of The policy PMA and timber Log and SVLK which complicates the perpetration.

Researchers recommend to improve the implementation of the policy for maximum.

Keywords: Evaluation, Barriers To Furniture Industry, Coaching, Empowerment, Protection

1. PENDAHULUAN

Industri mebel di Jepara telah dikenal di berbagai daerah bahkan di mancanegara. Mayoritas masyarakatnya menekuni usaha ini sebagai mata pencahariannya. Sehingga dikenal sebagai “Jepara Kota Ukir” dan *The World Carving Center*. Industri ini berperan penting dalam penyumbang Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Jepara. Oleh karena itu berpengaruh pada kondisi perekonomian daerah ini. Pemerintah daerah Jepara mengeluarkan kebijakan Peraturan daerah Jepara yaitu UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan, dan Pembinaan Industri Mebel (P3IM) sebagai upaya untuk menjaga eksistensi industri mebel terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi pelaku industri mebel. Kebijakan ini sebagai upaya untuk menciptakan iklim usaha industri mebel serta melibatkan peran aktif masyarakat dan asosiasi-asosiasi agar dapat terjalinnya hubungan antara pemerintah dan masyarakat secara aktif berpartisipasi untuk memajukan industri mebel di Jepara.

Implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan, dan Pembinaan Industri Mebel (P3IM) ini masih belum berjalan secara optimal. Pada tahun 2017, terjadi penurunan dari segi ekspor yang disebabkan masih banyaknya permasalahan yang terjadi di lapangan yang belum teratasi. Kendala yang pertama dalam pelaksanaan kebijakan tersebut adalah minimnya anggaran yang dirasa belum cukup untuk menjangkau semua pembinaan dan pelatihan-pelatihan yang dilakukan. Yang kedua yaitu kondisi pegawai Disperindag Kabupaten Jepara sebagai pelaksana kebijakan masih terbatas dan yang terakhir belum optimalnya pelaksanaan sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan dan Pembinaan Industri (P3IM) Jepara. Selain itu juga, terdapat faktor-faktor yang juga menghambat perkembangan industri mebel sehingga mempengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut yaitu adanya keterbatasan bahan baku kayu di Jepara sehingga harga kayu semakin meningkat, dan semakin sulitnya mencari tenaga kerja produksi mebel akibat banyaknya investor asing yang masuk ke Jepara untuk mendirikan pabrik garmen. Hal tersebut mengakibatkan regenerasinya pelaku industri mebel akan semakin terancam. Dan

permasalahan-permasalahan tersebut yang menghambat produktivitas dan kemajuan bagi industri ini.

Berdasarkan latar belakang di atas yang sudah dijelaskan, maka penulis tertarik melakukan penelitian untuk mengkaji lebih dalam mengenai evaluasi Peraturan daerah Jepara Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan dan Pembinaan Industri Mebel yang masih terdapat beberapa masalah yang muncul sehingga dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan harapan masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif-kuantitatif atau *mixed method* dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, data/arsip, dan kuesioner. Informan pada penelitian ini adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara yaitu Kepala Bidang Perindustrian, Kasi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan (IKAHH), Kasi Promosi Ekspor dan Impor. Kemudian Wakil Ketua I Kadin Jepara, Ketua dan Wakil Ketua dari Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) dan Ketua Asosiasi Pengrajin Kayu Jepara (APKJ), dan pelaku industri mebel baik Pengusaha dan Pengrajin Industri Mebel Jepara. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan di kawasan industri mebel dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara. Kemudian data yang diperoleh tersebut dianalisis dengan menggunakan triangulasi teori, sumber dan metode.

3. TINJAUAN PUSTAKA

3.1 Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan ini merupakan tahap akhir dalam kebijakan. Menurut Charles O. Jones, mendefinisikan bahwa evaluasi kebijakan sebagai aktivitas yang direncanakan untuk menilai hasil program pemerintah pemerintah yang memiliki perbedaan dalam spesifikasi objek, teknik, pengukuran dan metode analisa. Aktivitas tersebut untuk

mengetahui dampak kebijakan baik yang diharapkan atau tidak terhadap permasalahan yang terjadi dalam situasi sekarang ataupun yang akan datang. Evaluasi kebijakan ini dapat dilakukan dengan mengukur sebuah kebijakan dengan mengacu pada empat indikator menurut Brighman and Davis yaitu :

1. Indikator masukan (*Input*) yaitu menilai sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan.
2. Indikator proses (*process*) yaitu menilai bagaimana sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat dengan mengukur tingkat efektifitas dan efesiensi dari metode atau cara yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan.
3. Indikator hasil (*output*) yaitu menilai pada hasil atau produk yang dihasilkan dari sistem atau proses kebijakan publik.
4. Indikator dampak (*outcome*) yaitu menilai memfokuskan diri pada pertanyaan dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan.

Kemudian kriteria menurut William Dunn untuk mengukur dalam proses pelaksanaan kebijakan dapat dikatakan berhasil atau tidak yaitu :

1. Efektifitas yaitu tingkat capaian hasil yang diinginkan.
2. Efesiensi yaitu usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan
3. Kecukupan yaitu pencapaian hasil yang diinginkan dapat memecahkan masalah
4. Perataan yaitu biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda
5. Responsivitas yaitu hasil kebijakan memuaskan kebutuhan preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu
6. Ketepatan yaitu hasil atau tujuan benar-benar berguna atau bernilai

3.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Industri

Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sebuah industri menurut High Smith yang mana dapat menjadikan perkembangan industri kearah lebih baik atau sebaliknya yaitu :

1. Faktor sumberdaya yang berkaitan dengan sumber daya alam yang berperan penting dalam mendukung proses produksi sebuah industri berupa bahan mentah, sumber energi, penyediaan air, iklim dan bentuk lahan.
2. Faktor sosial berupa penyediaan tenaga kerja, keterampilan dan kemampuan teknologi serta kemampuan berorganisasi
3. Faktor ekonomi berupa pemasaran yang dapat menentukan hidup matinya suatu industri, transportasi yang digunakan untuk mendistribusikan produk-produk yang akan dijual serta modal juga sangat diperlukan untuk kegiatan industri
4. Faktor kebijakan pemerintah berupa ketentuan-ketentuan perpajakan dan tariff, pembatasan impor-ekspor guna memproteksi hasil industri dalam negeri dan mendorong ekspor dan adanya pembatasan jumlah dan macam industri, penentuan daerah industri, pengembangan kondisi dan iklim yang menguntungkan usaha.

4. PEMBAHASAN

4.1 Evaluasi Kebijakan Peraturan daerah Jepara Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan dan Pembinaan Industri Mebel

Indikator *input* meliputi sumber daya manusia dan sarana dan prasarana untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Ditingkat Dinas Perindustrian dan Perdagangan sudah baik dalam menjalankan tugas dan perannya hanya saja masih terbatasnya ketersediaan pegawai, sedangkan kondisi sarana dan prasarananya kurang memadai karena tidak adanya ruangan khusus untuk pameran dan pelatihan serta anggaran yang terbatas. Sedangkan di tingkat asosiasi baik HIMKI, dan APKJ sudah memadai meliputi sumberdaya manusianya dan sarana prasarananya. Oleh karena, pada tahap ini sudah cukup baik untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

Indikator *process* merupakan tahap pelaksanaan kebijakan yang ditransformasikan dalam wujud pelayanan kepada sasaran kebijakan serta mengetahui tingkat efektivitas dan efesiansinya. Kebijakan ini bertujuan untuk membina dan memberdayakan industri mebel agar semakin berkembang, berdaya saing dan semakin mandiri serta melindungi

industri mebel agar menjadi industri yang tangguh. Selain itu target yang ingin dicapai adalah untuk meningkatkan ekspor industri mebel bagi pelakunya. Proses pelaksanaan kebijakan Perda Jepara No. 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan dan Pembinaan Industri Mebel sudah berjalan secara efektif meskipun belum efisien. Dari tingkat keefektifannya, fungsi pelayanan pembinaan, pemberdayaan industri mebel sudah berjalan dengan baik meskipun terdapat beberapa aspek dari pelayanan perlindungan yang belum dijalankan. Beberapa pelayanan yang sudah efektif dilakukan untuk meningkatkan industri mebel yaitu seperti pelatihan, pendidikan, pengembangan sarana pemasaran, fasilitasi modal, penguatan kelembagaan untuk asosiasi mebel, pembangunan sarana dan prasarana mebel, pembentukan sentra industri mebel. Sedangkan tingkat keefesiensiannya, usaha Pemda Jepara dalam melaksanakan sosialisasi terkait Kebijakan P3IM belum dilaksanakan secara rutin dan maksimal. Namun usaha lainya dalam memberikan pelayanan kepada pelaku industri mebel sudah cukup efisien. Hal tersebut dikarenakan masih adanya kendala yang dihadapi yaikni dari segi anggaran yang terbatas dan belum ada mekanisme yang pasti berupa SOP khusus untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

Indikator *output* meliputi keluaran atau produk yang sesuai dengan tujuan kebijakan yang ingin dicapai. Hasil kebijakan ini telah tercapainya industri mebel yang berdaya saing, mandiri dan semakin berkembang dengan adanya beberapa pelayanan pembinaan dan pemberdayaan seperti Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi, Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial dan Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor. Selain itu juga adanya beberapa pameran seperti IFEX, Jepara Expo, Kartini Expo, dan lain-lain serta Kredit Usaha Rakyat (KUR). Oleh karena itu, hasil kebijakan tersebut dapat meningkatkan nilai ekspor industri mebel di Jepara pada tahun 2015-2019. Akan tetapi mampu mencapai industri mebel yang tangguh dan melindungi dari berbagai permasalahan yang terjadi. Hasil pelaksanaan perlindungan berupa jalan dan jembatan serta bahan baku kayu, pembentukan beberapa sentra industri mebel di Jepara. Meskipun hasil kebijakan ini belum sesuai dengan yang diharapkan namun sudah tepat sasaran yaitu untuk pelaku industri mebel baik industri rumahan, kecil, menengah ataupun asosiasi.

Indikator *outcome* merupakan hasil kebijakan yang telah memberikan dampak secara nyata terhadap sasaran kebijakan. Dampak yang dirasakan pelaku industri mebel adalah peningkatan pada usaha mebel karena terjadi peningkatan pada jumlah produk yang dijual, dan jumlah produksi. Dampak positif kebijakan ini adalah terjadinya peningkatan kualitas pelaku industri mebel meningkat, mudahnya dalam mendapatkan modal, kelancaran distribusi barang, ketersediaan bahan baku sehingga memudahkan pelaku industri mebel dalam menjalankan usahanya. Sedangkan dampak negatifnya adalah tidak adanya peningkatan jumlah tenaga kerja produksi, keuntungan yang diperoleh pelaku industri mebel kurang maksimal karena harga yang dijual semakin murah dan perluasan pangsa pasar masih kurang karena kondisi pasar industri mebel di Jepara yang semakin lesu atau sepi.

4.1 Faktor-Faktor Penghambat Perkembangan Industri Mebel Di Jepara

Faktor sumberdaya yang berkaitan dengan sumberdaya alam yang dibutuhkan dalam proses produksi industri mebel yaitu kayu yang menjadi bahan utama. Namun terjadi kelangkaan bahan baku kayu di Jepara akibat dampak penjarahan kayu pada tahun 1998. Sehingga bahan baku di Jepara diperoleh dari luar Jawa dan harganya sangat mahal. Kondisi harga kayu yang semakin meningkat tersebut merugikan bagi para pelaku industri mebel di Jepara. Akibatnya terjadi penurunan pelaku industri mebel karena tidak mampu mempertahankan usahanya. Disamping itu, laju pertumbuhan industri yang sangat cepat tidak sebanding dengan laju penanaman kayu yang membutuhkan waktu sekitar 25-35 tahun. Laju pertumbuhan industri mebel ini sebenarnya sangat baik bagi perekonomian di daerah namun dampak di masa mendatang ketersediaan kayu akan semakin langka.

Faktor sosial sangat berpengaruh pada kondisi perkembangan industri mebel di Jepara. Proses produktivitas industri mebel membutuhkan tenaga kerja produksi yang memiliki keahlian dan kemampuan khusus dalam bidang tersebut. Saat ini, kuantitas dan kualitas dari tenaga kerja industri mebel semakin menurun. Terjadi keterbatasan tenaga kerja karena banyak yang beralih profesi khususnya anak-anak muda. Meskipun upah yang ditawarkan tinggi namun pekerjaan industri mebel itu sangat kompleks dan berat. Oleh karena itu berpengaruh pada ketersediaan tenaga kerja industri mebel serta ketrampilan dan

kemampuan yang dimiliki masyarakat Jepara yang mana menyebabkan semakin terancamnya regenerasi industri mebel.

Faktor ekonomi yang berpengaruh pada perkembangan industri mebel di Jepara adalah kondisi pasar yang sedang terganggu dan menurun akibat terjadi persaingan dengan Negara lain seperti Negara Asia seperti Vietnam, China dll, Negara tersebut menjual produk yang kualitasnya baik dengan harga yang murah. Sehingga mengurangi daya beli produk industri mebel di Indonesia. Kemudian perpindahan strategi pemasaran secara *online* melalui media sosial ini disalahgunakan oleh pemula atau masyarakat luar Jepara yang mengatasnamakan pengusaha Jepara untuk menipu. Hal tersebut justru mencemarkan nama Jepara yang mempunyai brand sebagai Kota Ukir. Selain itu juga keterbatasan modal juga seringkali dihadapi pelaku industri mebel.

Faktor kebijakan berkaitan dengan keterlibatan pemerintah dalam kegiatan industri untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ekonomi yang sedang dihadapi. Terdapat beberapa kebijakan dari Pemerintah Pusat yang justru menghambat industri mebel yaitu kebijakan Penanaman Modal Asing (PMA) dan kebijakan Keran Ekspor Kayu Log. Kebijakan Penanaman Modal Asing (PMA) bertujuan untuk menciptakan iklim usaha serta menciptakan lapangan pekerjaan namun imbasnya adalah pelaku industri mebel kesulitan mencari tenaga kerja produksi karena anak-anak muda lebih tertarik bekerja di pabrik. Sedangkan kebijakan Keran Ekspor Kayu Log berdampak buruk bagi ketersediaan bahan baku kayu di Indonesia yang menyebabkan ketersediaannya akan semakin langka dan mahal. Dan yang terakhir adalah permasalahan adanya ketentuan khusus untuk ekspor yang mana harus memiliki SVLK sebagai legalitas kayu produksi yang digunakan. Namun justru memperberat karena biayanya yang harus dikeluarkan besar.

5. PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Pada tahap input atau masukan, sumber-sumber kebijakan yang digunakan sudah cukup memadai. Kemudian pelaksanaan kebijakan telah ditransformasikan dalam bentuk pelayanan pembinaan, pemberdayaan dan perlindungan kepada pelaku industri mebel sudah

efektif. Namun upaya yang dilakukan Disperindag belum efisien, karena pelaksanaan sosialisasi belum dilaksanakan secara maksimal. Sehingga pelaksanaannya dapat dikatakan belum optimal. Hasil kebijakan P3IM sudah tepat sasaran yaitu dapat meningkatkan industri mebel menjadi industri yang berdaya saing, dan mandiri meskipun belum berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Hasil kebijakannya adalah adanya Program untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), pameran seperti Jepara Expo, Kartini Expo, IFEX, UNICRAFT, Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan suku bunga bank 6-7% per tahun dan penguatan infrastruktur berupa jalan dan jembatan untuk akses distribusi barang serta pembentukan sentra industri sebagai Desa Industri Kreatif di Jepara. Dampak kebijakan bagi pelaku industri mebel adalah adanya peningkatan usaha. Oleh karena itu, dampak positif yang diperoleh yaitu meningkatkan kualitas pelakunya, kemudahan dalam mendapatkan modal, kelancaran distribusi barang, adanya lembaga/asosiasi yang berperan penting untuk peningkatan industri mebel di Jepara. Sedangkan dampak negatif yaitu belum mampu meningkatkan jumlah tenaga kerja industri mebel, keuntungan yang belum maksimal dan pangsa pasar yang masih kurang.

Kebijakan Peraturan daerah Jepara Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan dan Pembinaan Industri Mebel belum optimal karena terdapat faktor-faktor yang menghambat dalam perkembangan industri mebel. Faktor yang pertama adalah sumber daya yaitu ketersediaan bahan baku kayu di Jepara yang semakin terbatas sehingga harganya mengalami peningkatan terus menerus. Kemudian faktor sosial yaitu terbatasnya kuantitas dan kualitas tenaga kerja produksi industri mebel sehingga mengganggu proses produktivitas. Dan faktor ekonomi yaitu pangsa pasar industri mebel yang menurun karena Negara-negara lain-lain menjual produk mebel dengan kualitas yang baik dan harga yang murah. Kemudian dari penyalahgunaan strategi pemasaran secara *online* untuk menjual dengan harga yang murah dan kualitas yang tidak sesuai sehingga juga berpengaruh pada menurunnya standar harga jual serta keterbatasan modal yang dimiliki pelaku industri mebel untuk kegiatan operasionalisasi produksi. Faktor yang terakhir yaitu kebijakan pemerintah berupa kebijakan Keran Ekspor Kayu Log, PMA dan ketentuan kepemilikan SVLK yang dikeluarkan pemerintah pusat justru mempersulit pelaku industri mebel. Oleh karena itu kebijakan tersebut belum mampu memperkuat industri mebel agar menjadi industri yang tangguh karena tidak mampu melindungi keberadaan industri mebel di Jepara.

5.2 SARAN

1. Memperbaiki kebijakan P3IM untuk dilanjutkan yaitu melalui :

- Pengajuan anggaran khusus untuk pelaksanaan sosialisasi dan program kegiatan industri mebel lainnya.
- Dibuatnya SOP sebagai pedoman yang khusus mengatur pelaksanaan kebijakan Peraturan daerah Jepara Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan dan Pembinaan Industri Mebel (P3IM) agar pelaksanaan kebijakan ini lebih maksimal.
- Dilakukan sosialisasi tentang kebijakan P3IM secara rutin disetiap daerah di Jepara yaitu 2x dalam seminggu, bahkan dapat dilakukan secara *door to door* kepada masyarakat agar masyarakat memahami isi kebijakan ini.
- Pemda Jepara harus lebih meningkatkan aspek Perlindungan karena masih banyak beberapa pelayanan yang belum terlaksana agar dapat menjaga tetap terjaganya keberadaan industri mebel di Jepara.

2. Meminimalisir faktor-faktor penghambat bagi perkembangan industri mebel melalui :

- Adanya material center untuk menjaga kestabilan harga bahan baku dan penolong agar tetap terjangkau
- Peningkatan kualitas SDM dengan memasukkan jurusan pendidikan ukir di setiap sekolah agar tetap lestari dan memiliki ketrampilan khusus tentang mebel
- Peningkatan standar upah dan adanya sertifikasi bagi tenaga kerja mebel
- Penguatan struktur pasar industri mebel melalui kerjasama dengan para pelaku industri
- Mengajukan kepada Pemerintah Pusat untuk melakukan penghapusan kebijakan Keran Ekpor Kayu Log dan membuat regulasi tentang pembatasan investor asing yang masuk Jepara. Selain itu, menetapkan kepemilikan SVLK hanya ditujukan bagi industri hulu dan Perhutani saja agar tahapan pengecekan legalitas kayu sudah dapat diselesaikan pada pihak tersebut. Sehingga akan lebih mempermudah bagi pelaku industri mebel di Jepara.

DAFTAR PUSTKA

- Akbar, Muh Firyal & Mohi, Widya Kurniati. 2018. *Studi Evaluasi Kebijakan (Evaluasi Beberapa Kebijakan di Indonesia)*. Gorontalo: Ideas Publishing,
- Badjuri, Abdul Kahar dan Teguh Yuwono. 2003. *Kebijakan Publik (Konsep dan Strategi)*
- Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Wibawa, Samodra. 2011. *Politik Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Winarno, Budi. 2007. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik, teori, proses dan studi kasus*. Jakarta : CAPS.PT. Buku Seru
- Asmindo: Biaya sertifikasi SVLK tergolong mahal. 2015. Diakses dari <https://www.google.co.id/amp/s/m.antaranews.com/amp/berita/523828/asmindo-biaya-sertifikasi-svlk-tergolong-mahal>, pada hari Minggu, 16 Februari 2020, pukul 20.10 WIB
- <http://kemenperin.go.id/regulasi/>, diakses pada tanggal 1 September 2018 10.12 WIB
- Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Industri, <https://www.psychologymania.com/2013/04/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-industri.html>, diakses pada hari Selasa, 24 September 2019, pukul 08.11 WIB
- <https://radarkudus.jawapos.com/read/2019/02/25/121472/nilai-ekspor-furnitur-kabupaten-jepara-naik-729-persen>, diunduh pada hari Senin, 29 April 2019, pukul 17.22 WIB
- <http://www.koranmuria.com/2015/05/09/1334/industri-mebel-menghadapi-banyak-kendala.html>, diakses pada hari Senin, 6 Mei 2019, pukul 11.22 WIB
- <https://www.murianews.com/2016/09/10/94167/banyak-industri-mebel-jepara-gulung-tikar-ini-penyebabnya.html>, diakses pada hari Senin, 6 Mei 2019 pukul 21.45 WIB
- Giri Hartomo. 2019. Ekspor Mebel Indonesia Kalah dari Vietnam hingga Malaysia. Diakses dari <https://www.google.co.id/amp/s/economy.okezone.com/amp/2019/03/11/320/2028344/ekspor-mebel-indonesia-kalah-dari-vietnam-hingga-malaysia>, pada hari Sabtu, 15 Februari 2020, pukul 22.30 WIB